

**PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER TERHADAP
PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI DI INDONESIA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh :

BALQIS HANIFATA

B300140190

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER TERHADAP
PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI DI INDONESIA**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

BALQIS HANIFATA

B300 140 190

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Surakarta, 13 Oktober 2018

Dosen Pembimbing



Dr. Didit Purnomo., S.E., MSi

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER TERHADAP
PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI DI INDONESIA**

Disusun Oleh :

BALQIS HANIFATA

B300 140 190

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta

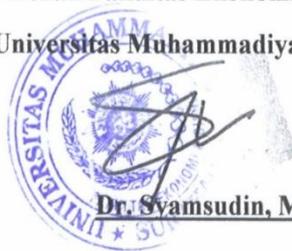
Pada Hari Sabtu 13 oktober 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

- | | |
|--|---|
| 1. Dr. Didit Purnomo, SE.,MSi
(Ketua Dewan Penguji) | () |
| 2. Ir. Maulidiyah Indira H, M.S.
(Anggota I Dewan Penguji) | () |
| 3. Muhammad Arif, S.E., M.Ec.Dev
(Anggota II Dewan Penguji) | () |

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta**



Dr. Svamsudin, M.M

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali saya tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 15 Oktober 2018

Penulis,



Balqis Hanifata

PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI DI INDONESIA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan fiskal (penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, pengeluaran pemerintah) dan kebijakan moneter terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder *time series* dari tahun 1990 sampai 2017. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda dengan pendekatan Model Penyesuaian Parsial atau *Partial Adjustment Model* (PAM) dengan menggunakan software SPSS. Analisis menunjukkan bahwa variabel bebas (independen) yang berpengaruh hanya variabel jumlah uang beredar dengan nilai signifikansi 0,0254 yang berarti secara parsial berpengaruh nyata terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Indonesia pada tingkat signifikansi 0,05. Sebaliknya, variabel penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, pengeluaran pemerintah, dan suku bunga tidak berpengaruh signifikan nyata terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Indonesia.

Kata Kunci; Fiskal, Moneter, Tenaga Kerja, Industri, PAM

Abstrak

This study aims to determine the effect of fiscal policy (tax revenues, non-tax revenues, government spending) and monetary policy on employment in the industrial sector in Indonesia. The data used is secondary time data from 1990 to 2017. The analytical tool used is multiple regression analysis with Partial Adjustment Model (PAM) approach using SPSS software. The analysis shows that the independent variable (independent) which influences only the variable money supply with a significance value of 0.0254 which means partially significant effect on employment in the industrial sector in Indonesia at the 0.05 level of significance. Conversely, the variables of tax revenue, non-tax revenues, government spending, and interest rates have no significant effect on employment in the industrial sector in Indonesia.

Keywords; Fiscal, Monetary, Labor, Industry, PAM

1. PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan nasional berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pembangunan merupakan salah satu cara untuk mencapai keadaan tersebut. Selama ini pembangunan selalu diprioritaskan pada sektor ekonomi, sedang sektor lain hanya bersifat menunjang dan melengkapi sektor ekonomi. Pembangunan selain memberi dampak positif juga memberi dampak negatif terutama yang

berkaitan dengan berbagai masalah tenaga kerja dan kesempatan kerja (Sunusi, 2014).

Dalam proses pembangunan, sektor industri dijadikan sebagai prioritas pembangunan yang diharapkan mempunyai peranan sebagai *leading sector* atau sektor pemimpin bagi pembangunan sektor-sektor lainnya (Arsyad, 2010). Sektor industri dipandang sebagai sektor yang memiliki tingkat produktivitas yang tinggi, sehingga dengan keunggulan sektor industri akan didapat nilai tambah yang tinggi, yang pada akhirnya tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi lebih cepat terwujud. Kenyataannya tidak semua negara berhasil mengembangkan sektor industrinya yang disebabkan oleh kebijakan yang tidak tepat dan tidak konsisten, sehingga mempengaruhi kinerja sektor industri itu sendiri (Suharto, 2002).

Salah satu tujuan penting dalam pembangunan ekonomi melalui proses industrialisasi adalah penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk mengejar pertumbuhan angkatan kerja yang pertumbuhannya lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja (Rochmani, 2016). Produk-produk industrial selalu memiliki “dasar tukar” (*terms of trade*) yang lebih tinggi dan lebih menguntungkan serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan produk-produk sektor lain (Dumairy, 2009). Hal ini disebabkan karena sektor industri memiliki variasi produk yang sangat beragam dan mampu memberikan manfaat marginal yang tinggi kepada pemakainya. Besarnya potensi sektor industri di Indonesia dalam hal penyerapan tenaga kerja dapat dilihat dalam tiga tahun terakhir dari tahun 2015-2017 pada tabel berikut :

Tabel 1 Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Indonesia Tahun 2015-2017

No	Lapangan Pekerjaan Utama	2015	2016	2017	Jumlah
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	77,871,044	76,061,276	75,602,339	229,534,659
2	Pertambangan dan Penggalian	2,741,383	2,788,318	2,762,359	8,292,060
3	Industri	31,637,855	31,515,320	33,581,986	96,735,161
4	Listrik, Gas, dan Air	600,531	761,031	808,722	2,170,284

	Minum				
5	Konstruksi	15,922,470	15,685,864	15,299,604	46,907,938
6	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	52,333,510	55,185,066	57,278,541	164,797,117
7	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	10,298,998	10,801,240	11,452,116	32,552,354
8	Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	6,910,419	7,013,123	7,344,919	21,268,461
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	37,349,810	39,248,432	41,430,686	118,028,928
Jumlah		235,666,020	239,059,670	245,561,272	

Sumber: Badan Pusat Statistik (2017), diolah.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa dalam sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia tahun 2015-2017 adalah sektor pertanian yang menyerap 229.534.659 tenaga kerja. Urutan kedua penyerap tenaga kerja terbesar adalah sektor perdagangan sebanyak 164.797.117 tenaga kerja dan disusul sektor jasa sebanyak 118.028.928 tenaga kerja. Sedangkan sektor industri menempati urutan keempat penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia dengan jumlah 96.735.161 tenaga kerja.

Perkembangan penyerapan tenaga kerja sektor industri mengalami fluktuatif dari tahun 2015-2017. Pada tahun 2015 sektor industri mampu menyerap 31.637.855 tenaga kerja, kemudian turun menjadi 31.515.320 di tahun 2016 dan kembali meningkat pada tahun 2017 sebanyak 33.581.986 tenaga kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor industri di Indonesia telah mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Penyerapan tenaga kerja juga tidak terlepas dari peranan pemerintah sebagai penyusun instrumen kebijakan yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian di Indonesia. Instrumen kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah meliputi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal mencakup kekuasaan mengenakan pajak dan membelanjakan atau mengeluarkan uang

sedangkan kebijakan moneter menyangkut suku bunga dan jumlah uang yang beredar (Aprilia, 2016).

Kebijakan moneter dan fiskal merupakan komponen fundamental untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keberhasilan fungsi ekonomi tergantung pada kegiatan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dan tidak adanya koordinasi ini mengarah pada kinerja ekonomi keseluruhan yang buruk. Kebijakan-kebijakan ini dilakukan oleh dua otoritas yang terpisah, mereka saling bergantung, dan oleh karena itu, sangat penting untuk mencapai kerangka kerja bauran kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan (Budiyanti, 2014).

Kehadiran hubungan yang berbeda antara pasar tenaga kerja dan kebijakan fiskal menimbulkan kemungkinan dampak yang buruk. Tingkat pengangguran adalah bagian dari perbedaan antara angkatan kerja dan pekerjaan pada angkatan kerja menimbulkan masalah teoritis dan empiris: pada sisi teoritis, tenaga kerja dapat dianggap sebagai proksi dari penawaran tenaga kerja (penawaran tenaga kerja sama dengan jumlah orang yang mencari pekerjaan). Di sisi empiris, GDP mempengaruhi tingkat angkatan kerja karena orang yang menganggur menjadi berkecil hati dan keluar dari angkatan kerja selama periode tersebut (Tafuro, 2015).

Kondisi perekonomian tidak selalu berjalan mulus namun seringkali terpukul akibat adanya shock atau guncangan, di mana guncangan tersebut dapat menyebabkan terjadinya masalah makro seperti pengangguran (rendahnya tingkat kesempatan kerja), inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan neraca pembayaran. Salah satu guncangan tersebut terjadi pada variabel moneter sehingga memengaruhi jumlah output dan kesempatan kerja suatu negara (Dogan, 2012). Untuk meredam efek guncangan tersebut, sebagai otoritas moneter, bank sentral telah menerapkan kebijakan moneter yang dapat berbentuk pengendalian besaran moneter variabel suku bunga untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan (Warjiyo, 2004).

2. METODE

2.1 Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder bentuk deret waktu (time series) selama 28 tahun dari periode 1990-2017. Data yang digunakan meliputi data penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, pengeluaran pemerintah sektor industri, suku bunga, dan jumlah uang beredar. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), publikasi dari penelitian terdahulu, jurnal serta sumber lain yang terikat.

2.2 Metode Analisis Data

Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan Model Penyesuaian Parsial atau Partial Adjustment Model (PAM), yang formulasi model estimatornya adalah sebagai berikut:

$$\log \widehat{PTK} *_t = \alpha_0 + \alpha_1 \log PNP_t + \alpha_2 \log PNB P_t + \alpha_3 \log PPI_t + \alpha_4 SB_t + \alpha_5 \log JUB_t + \lambda \log PTK_{t-1} + v_t \quad (1)$$

Dimana:

PTK = Penyerapan Tenaga Kerja

PNP = Penerimaan Perpajakan

PPI = Pengeluaran Pemerintah

SB = Suku Bunga

JUB = Jumlah Uang Beredar

$\lambda = (1 - \delta)$; nilainya $0 < \lambda < 1$; δ koefisien penyesuaian (adjustment)

$\alpha_0 = \delta\beta_0$; konstanta jangka pendek

$\alpha_1 = \delta\beta_1$; koefisien regresi penerimaan perpajakan jangka pendek

$\alpha_2 = \delta\beta_2$; koefisien regresi penerimaan bukan pajak jangka pendek

$\alpha_3 = \delta\beta_3$; koefisien regresi pengeluaran pemerintah jangka pendek

$\alpha_4 = \delta\beta_4$; koefisien regresi suku bunga jangka pendek

$\alpha_5 = \delta\beta_5$; koefisien regresi jumlah uang beredar jangka pendek

β_0 = konstanta jangka panjang

β_1 = koefisien regresi penerimaan perpajakan jangka panjang

- β_2 = koefisien penerimaan bukan pajak jangka panjang
- β_3 = koefisien regresi pengeluaran pemerintah jangka Panjang
- β_4 = koefisien regresi suku bunga jangka panjang
- β_5 = koefisien regresi jumlah uang beredar jangka panjang
- v = unsur kesalahan (error term)
- t = tahun

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil estimasi model Partial Adjustment Model (PAM) terangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2
Hasil Regresi Model PAM

$\log(\text{PTK})_t = 6,359859 + 0,013731 \log\text{PNP}_t - 0,019802 \log\text{PNBP}_t - 0,067053 \log\text{PPI}_t$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> (0,0210) (0,8896) (0,7386) (0,6511) </div>
$- 0,002449 \text{SB}_t + 0,122843 \log\text{JUB}_t + 0,574521 \log\text{PTK}_{t-1} + v_t$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> (0,3524) (0,0254)** (0,0043)* </div>

$R_2 = 0,9420$; DW-Stat = 2,0418; F-Stat = 51,43112; Sig.F-Stat = 0,000

Uji Diagnosis

- (1) Multikolinieritas (uji VIF)
 $\log\text{PNP} = 163,7203$ $\log\text{PNBP} = 38,82538$ $\log\text{PPI} = 308,2543$
 $\text{SB} = 2,443167$ $\log\text{JUB} = 33,49758$ $\log\text{PTK}(-1) = 11,24806$
- (2) Autokorelasi (uji Breusch Godfrey)
 $\chi^2 = 2,909141$ $\text{sig}(\chi^2) = 0,4058$
- (3) Linieritas (uji Ramsey Reset)
 $F = 0,702325$ $\text{sig}(F) = 0,4130$
- (4) Normalitas Residual (uji Jarque Bera)
 $\chi^2 = 4,356879$ $\text{sig}(\chi^2) = 0,113218$
- (5) Heteroskedastisitas
 $\chi^2 = 16,62909$ $\text{sig}(\chi^2) = 0,1641$

Keterangan: *signifikan pada $\alpha 0,01$; ** signifikan pada $\alpha 0,05$; *** signifikan pada $\alpha 0,10$. Angka di dalam kurung merupakan probabilitas statistik

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, diolah.

3.1 Uji Asumsi Klasik

3.1.1 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dalam penelitian ini adalah uji *Variance Inflation Factors* (VIF). Apabila nilai VIF >10 maka terdapat masalah multikolinieritas, apabila nilai VIF < 10 maka tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam model. Hasil uji VIF dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas (Uji VIF)

Variabel	VIF	Keterangan
PNP	163,7203	Terdapat masalah multikolinieritas
PNBP	38,82538	Terdapat masalah multikolinieritas
PPI	308,2543	Terdapat masalah multikolinieritas
SB	2,443167	Tidak terdapat masalah multikolinieritas
JUB	33,49758	Terdapat masalah multikolinieritas

Sumber: Bank Indonesia (diolah).

3.1.2 Uji Normalitas Residual

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Jarque Berra dengan formulasi hipotesis H_0 : distribusi normal dan H_A : distribusi tidak normal, dengan kriteria H_0 : diterima bila signifikansi statistik JB $> \alpha$, dan H_0 : ditolak bila signifikansi statistik JB $\leq \alpha$. Dari Tabel 2 diketahui bahwa Probabilitas statistik JB adalah sebesar 0,113 ($> 0,10$), maka H_0 diterima kesimpulan u_t normal.

3.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini, untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji White dengan formulasi hipotesis H_0 : tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model dan H_A : terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model, dengan kriteria pengujian H_0 diterima bila signifikansi $\chi^2 > \alpha$ dan H_0 ditolak bila signifikansi $\chi^2 \leq \alpha$. Dari Tabel 2 diketahui nilai probabilitas statistik χ^2 dari hasil uji white tersebut sebesar 0,1641 ($> 0,10$), maka H_0 diterima. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model.

3.1.4 Uji Otokorelasi

Uji otokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Breusch Godfrey dengan formulasi hipotesis H_0 : tidak terdapat masalah otokorelasi dan H_A : terdapat masalah otokorelasi, dengan kriteria pengujian H_0 diterima bila signifikansi $\chi^2 > \alpha$ dan H_0 ditolak bila signifikansi $\chi^2 \leq \alpha$. Dari Tabel 2 diketahui nilai probabilitas statistik χ^2 dari hasil uji Breusch Godfrey sebesar 0,4058 ($> 0,10$), maka H_0 diterima. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat masalah otokorelasi dalam model.

3.1.5 Uji Spesifikasi Model (Linieritas)

Uji spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ramsey Reset dengan formulasi hipotesis H_0 : model linier (spesifikasi model benar) dan H_A : model tidak linier (spesifikasi model salah), dengan kriteria pengujian; H_0 diterima bila signifikansi F hitung atau statistik $F > \alpha$, dan H_0 ditolak bila signifikansi F hitung atau statistik $F \leq \alpha$. Dari Tabel 2 diketahui bahwa nilai signifikansi dari hasil uji Ramsey Reset sebesar 0,4130 ($> 0,10$). Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa H_0 diterima, sehingga spesifikasi model benar (model linier).

3.2. Uji Kebaikan Model

3.2.1 Eksistensi Model (Uji F)

Uji eksistensi dalam penelitian ini menggunakan uji F dengan formulasi hipotesis; $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$; model yang dipakai tidak eksis, dan $H_A : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$; model yang dipakai eksis, dengan kriteria pengujian; H_0 ditolak bila signifikansi statistik $F \leq \alpha$, dan H_0 diterima bila signifikansi statistik $F > \alpha$. Dari Tabel 2 diketahui nilai signifikansi statistik F adalah sebesar 0.0000 ($\leq 0,05$), maka H_0 ditolak sehingga model yang dipakai eksis.

3.2.2 Interpretasi Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa, nilai *R-squared* (R^2) sebesar 0.942 , artinya 94,2 persen variasi variabel penyerapan tenaga kerja sektor industri di Indonesia dapat dijelaskan oleh variabel independen penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, pengeluaran pemerintah, suku bunga, dan jumlah uang

beredar model statistik. Sedangkan sisanya 5,8 persen dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor - faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.

3.3 Uji Validitas Pengaruh (Uji T)

Uji t ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing -masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Formulasi hipotesisnya yaitu $H_0 : \beta_i = 0$; variabel independen ke-i tidak memiliki pengaruh signifikan dan $H_A : \beta_i \neq 0$; variabel independen ke-i memiliki pengaruh signifikan. Kriteria pengujiannya yaitu H_0 diterima bila probabilitas statistik $t_i > \alpha$ dan H_0 ditolak bila probabilitas statistik $t_i \leq \alpha$. Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Pengaruh (Uji t)

Variabel	Prob. T	A	Kesimpulan
PNP	0,8896	< 0,10	Tidak berpengaruh signifikan dalam jangka pendek dan jangka panjang
PNBP	0,7386	> 0,10	Tidak berpengaruh signifikan dalam jangka pendek dan jangka panjang
PPI	0,6511	> 0,10	Tidak berpengaruh signifikan dalam jangka pendek dan jangka panjang
SB	0,3524	> 0,10	Tidak berpengaruh signifikan dalam jangka pendek dan jangka panjang
JUB	0,0254	< 0,05	Berpengaruh signifikan dalam jangka pendek dan jangka panjang

Sumber: Bank Indonesia (diolah).

3.4 Interpretasi Pengaruh Variabel Independen

Berdasarkan uji validitas pengaruh di muka terlihat bahwa variabel independen yang memiliki pengaruh signifikan adalah variabel jumlah uang beredar (JUB). Sedangkan yang tidak signifikan adalah variabel penerimaan perpajakan (PNP),

penerimaan bukan pajak (PNBP), pengeluaran pemerintah (PPI), dan suku bunga (SB).

Variabel jumlah uang beredar dalam jangka pendek memiliki koefisien regresi sebesar 0,122. Pola hubungan antara jumlah uang beredar dengan penyerapan tenaga kerja sektor industri adalah logaritma-logaritma, artinya apabila jumlah uang beredar naik satu persen maka penyerapan tenaga kerja sektor industri akan naik sebesar 0,122 persen. Sebaliknya apabila jumlah uang beredar turun satu persen maka penyerapan tenaga kerja sektor industri akan turun sebesar 0,122 persen. Dalam jangka panjang jumlah uang beredar memiliki koefisien regresi sebesar 0,288, artinya apabila jumlah uang beredar naik satu persen maka penyerapan tenaga kerja sektor industri akan naik sebesar 0,288 persen. Sebaliknya apabila jumlah uang beredar turun satu persen maka penyerapan tenaga kerja sektor industri akan turun sebesar 0,288 persen.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri, hal ini mengartikan bahwa meningkatnya jumlah uang beredar diikuti di Indonesia pada tahun 1990-2017 diikuti dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor industri, begitu pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahdi (2014) menunjukkan jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Terdapatnya pengaruh yang signifikan antara jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh jumlah uang beredar. Hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan jumlah uang beredar akan mengakibatkan tersedianya likuiditas kepada perekonomian sehingga perekonomian menjadi lebih bergairah. Tersedianya likuiditas yang cukup bagi perekonomian akan berdampak terhadap peningkatan sektor-sektor ekonomi produktif sehingga sektor tersebut bisa meningkatkan produktivitasnya. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan dapat mempengaruhi peningkatan penyerapan tenaga kerja industri. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat menggambarkan pertumbuhan jumlah proyek sektor industri dan jumlah kebutuhan tenaga kerja di sektor industri.

Sehingga akan semakin banyak tenaga kerja yang terserap oleh pasar yang memberikan respon positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

- a. Berdasarkan hasil estimasi regresi PAM (*Partial Adjustment Model*) memperlihatkan bahwa model terestimasi benar-benar merupakan model PAM dengan koefisien regresi sebesar 0,574521 yang berarti memenuhi syarat $0 < \lambda < 1$ dan memiliki nilai probabilitas (signifikansi) empirik statistik t sebesar 0,000 yang berarti koefisien *adjustment* signifikan pada $\alpha = 0,01$.
- b. Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik, tidak ditemukan masalah pada variabel suku bunga. Tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi dalam model. Model yang digunakan dalam uji normalitas tidak terdapat penyimpangan, sehingga dapat dikatakan bahwa distribusi U_t normal. Dalam uji linieritas menunjukkan spesifikasi model benar.
- c. Berdasarkan uji validitas pengaruh (uji t) yang dilakukan pada penyerapan tenaga kerja industri disimpulkan variabel penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, pengeluaran pemerintah, dan suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja industri. Variabel jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, pengaruh jangka pendek sebesar 0,122843 dan dalam jangka panjang sebesar 0,288716.
- d. Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa variabel penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, pengeluaran pemerintah, suku bunga, dan jumlah uang beredar memberikan kontribusinya sebesar 94,2 persen terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Indonesia, sedangkan sisanya 5,8 persen dipengaruhi oleh variabel bebas lain di luar model yang digunakan.

4.2 Saran

Saran yang disimpulkan berdasarkan penelitian ini adalah:

- a. Pemerintah sebaiknya tidak hanya fokus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga memperhatikan lapangan kerja yang tersedia dengan cara meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri.
- b. Pemerintah juga perlu menjaga stabilitas inflasi melalui serangkaian kebijakan fiskal dan moneter agar inflasi berada di titik optimal sehingga tidak berpotensi untuk menurunkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri.
- c. Pemerintah harus lebih mempertimbangkan dampaknya bagi penyerapan tenaga kerja sektor industri di Indonesia ketika merumuskan kebijakan fiskal dan moneter seperti melakukan peningkatan efisiensi dan penargetan belanja pemerintah, dan pemerintah sebaiknya terus melakukan pengawasan terhadap penerimaan perpajakan dan jumlah uang yang beredar sehingga penyerapan tenaga kerja sektor industri di Indonesia dapat ditingkatkan secara berkesinambungan.
- d. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian yang telah penulis lakukan dengan melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja khususnya di sektor industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Anisa Dwi, dkk. (2016). *Analisis Pengaruh Fiskal Dan Moneter Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Di Indonesia*. Jurnal Agrista : Vol. 4 No. 3 September 2016 : Hal. 230 - 238 ISSN 2302-1713.
- Arsyad, Lincoln. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Edisi 5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Budiyanti, Eka. (2014). *Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Kinerja Sektor Industri Manufaktur Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 5 No. 2, Desember 2014.
- Doğan, T.T (2012). *Macroeconomic Variables and Unemployment: The Case of Turkey*. International Journal of Economics and Financial Issues Vol. 2, No. 1, 2012, pp.71-78 ISSN: 2146-4138.
- Dumairy. 2009. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga

- Mahdi, Hasdi Aimon, dkk. (2014). *Pengaruh Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi*. E-Journal Economy UNP.
- Rochmani, Siti Tanti, dkk. (2016). *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Provinsi Jawa Tengah*. JIEP-Vol. 16, No 2, November 2016 ISSN (P) 1412-2200 E-ISSN 2548-1851.
- Suharto. (2002). *Disparitas Dan Pola Spesialisasi Tenaga Kerja Industri Regional 1993 – 1996 dan Prospek Pelaksanaan Otonomi*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Kajian Ekonomi Negara Berkembang Vol. 7, No. 1, 2002
- Sunusi, Dewi Kurniawati, Anderson, dkk. *Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Pada Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Utara Tahun 2001-2010*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 14 no.2-Mei.
- Tafuro, Andrea. (2015). *The Effects of Fiscal Policy on Employment: an Analysis of the Aggregate Evidence*. Working Papers Department of Economics Ca' Foscari University of Venice. No. 03/WP/2015. ISSN 1827-3580.
- Warjiyo. (2004). *Penerapan Kebijakan Moneter Sebagai Acuan Perekonomian*. Jakarta.
- . Badan Pusat Statistik. *Indonesia Dalam Angka 1990-2017* Jakarta: BPS.
- . Bank Indonesia. *Indonesia Dalam Angka 1990-2017*. Jakarta: BI.